

SKRIPSI

kk

Per 12. '02

2014

P

HALIMATUS SA'DIYAH

**PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN
GRESIK**

(Studi kasus : PT. Gawih Jaya)



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

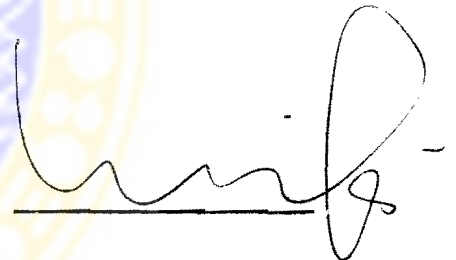
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
dihadapan panitia penguji
pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

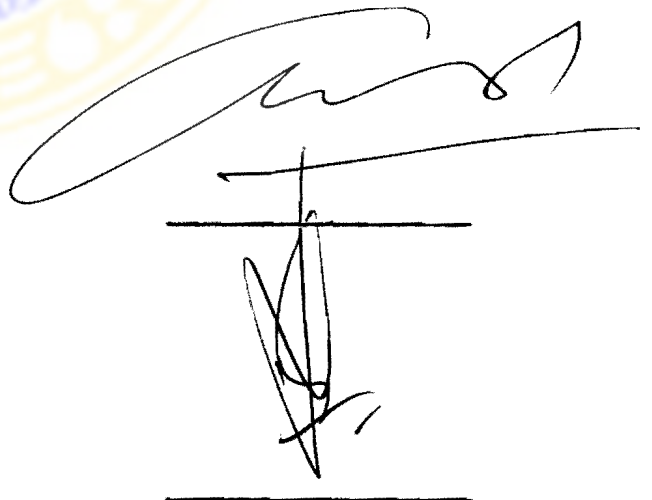
Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.



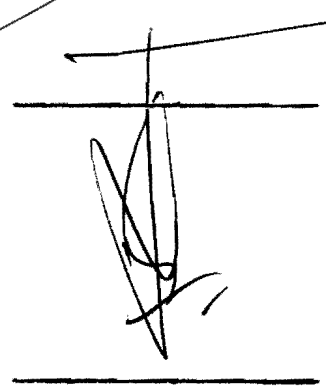
Anggota : 1. Urip Santoso, S.H., M.H.



2. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.



3. Sri Winarsih, S.H., M.H.



PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK

(Studi kasus : PT. Gawih Jaya)


SKRIPSI

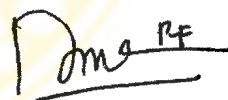
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**



Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Unip Santoso, S.H., M.H.
NIP. 131 878 392


Halimatus Sa'diyah
NIM. 039914837

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan :

- a. Izin lokasi di Kabupaten Gresik diterbitkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : (1) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah atau rencana lainnya yang dipakai acuan, (2) Aspek penguasaan tanah, teknis tata guna tanah yang bersangkutan, fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah, (3) Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan, (4) Kepentingan pihak ketiga yang ada dilokasi yang dimohon, (5) Kelayakan usaha dengan luas tanah yang dimohon, (6) Dampak lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang mungkin terjadi, (7) Konsultasi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- b. Perolehan tanah oleh perusahaan dilakukan sesudah diterbitkannya izin lokasi dan hanya boleh dilakukan di areal yang telah ditetapkan di dalam izin lokasi. Perolehan tanah dilakukan dengan melalui dua cara yaitu dengan cara pemindahan Hak atas tanah atau melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah. perolehan tanah melalui pemindahan hak dilakukan apabila tanah yang bersangkutan sudah dipunyai dengan hak atas tanah yang sama jenisnya dengan hak atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, apabila jenis hak atas tanah yang akan dipindahkan tidak sesuai dengan hak atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan, maka terlebih dahulu harus mengubah hak yang bersangkutan. Perolehan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak dilakukan apabila tanah

yang diperlukan dipunyai dengan hak milik atau hak lain yang tidak sesuai dengan jenis hak yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah dengan pihak investor yang membutuhkan tanah dengan pembuatan akte pelepasan hak di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah. Pada umumnya perolehan tanah oleh perusahaan di Kabupaten Gresik dilakukan melalui cara penyerahan atau pelepasan hak. Oleh karena itu untuk memperoleh hak atas tanah, perusahaan harus mengajukan permohonan hak atas tanah kepada negara melalui Kantor Pertanahan setempat. Hak atas tanah yang diberikan kepada perusahaan pada umumnya adalah Hak Guna Bangunan. Pemberian Hak Guna Bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Saran :

- a. Sebelum memberikan izin lokasi kepada suatu perusahaan, instansi yang berwenang terlebih dahulu harus meneliti secara cermat mengenai penguasaan dan penggunaan tanah yang dimohon dalam izin lokasi serta menilai kelayakan usaha dengan luas tanah yang dimohon. Hal ini untuk menghindari pemborosan dalam penggunaan tanah.
- b. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah, diharapkan lebih teliti dalam proses pemberian hak atas tanah kepada suatu perusahaan dalam rangka

penanaman modalnya. Proses pemberian hak terhadap suatu permohonan hak atas tanah tidak semata-mata hanya dengan melihat segi-segi prosedurnya saja, melainkan harus pula dikaji dari segi hukumnya yakni apakah pemohon adalah pihak yang berhak atas tanah yang bersangkutan dan apakah perolehan tanah yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

